

TESIS

**KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI UNTUK MEMASTIKAN
ADANYA PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT**



Oleh :

IDHA RACY ROSALIA HADI., S.HNIM :

031924253059

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGGA

SURABAYA

2022

**KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI UNTUK MEMASTIKAN ADANYA PERSAINGAN USAHA YANG
SEHAT**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

OLEH:

IDHA RACY ROSALIA HADI

NIM. 031924253059

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

Proposal Tesis ini telah disetujui,

Tanggal 31 Mei 2022

Oleh

Dosen Pembimbing Ketua,



Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LLM

NIP. 198402172006041001

Dosen Pembimbing Kedua,



Erni Agustin, S.H., LLM

NIP. 198308102006042001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Dr. Indira Retno Arvatie, S.H., M.H

NIP. 198003202005012002

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji :

31 Mei 2022

Ketua : Ria Setyawati, S.H.,M.H.,LL.M.

NIP : 198008202009122002

Anggota : 1. Prof.Dr.Lucianus Budi Kagramanto,S.H.,M.H

NIP : 196001061990021001

2. Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H, LLM

NIP : 198402172006041001

3. Erni Agustin, S.H., LLM

NIP : 198308102006042001

4. Rizky Amalia,S.H.,M.H.

NIP : 198901312016113201

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IDHA RACY ROSALIA HADI
NIM 031924253059

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 31 Mei 2022

Yang membuat pernyataan,



IDHA RACY ROSALIA HADI
NIM.0319242530959

MOTTO

“ ENJOY VERY STEP THAT YOU TAKE “

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas seluruh berkat dan anugerahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul **“KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI UNTUK MEMASTIKAN ADANYA PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT ”** sebagai pemenuhan syarat untuk mendapat gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam penulisan dan penyusunan Tesis ini Penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis baik selama kuliah maupun pada saat penyelesaian penulisan tesis ini antara lain :

1. Kepada kedua orang tua saya Ayah Samsul Hadi dan Mami Yuliati, kakak, dan kakak ipar penulis beserta keluarga besar penulis yang selalu memberikan support dan dalam doanya untuk menyelesaikan Tesis ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.d. beserta jajaran Wakil Dekan yang telah mendukung Selama penulis menjalani perkuliahan Kepada
3. Dr. Indira Retno Aryatie S.H.,M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan.
4. Kepada selaku dosen pembimbing saya Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H, LL.M yang telah banyak membantu penulis dengan memberikan bimbingan, meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dalam proses penulisan tesis ini. Terimakasih banyak atas segala ilmu yang telah berikan. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

5. Kepada para Tim Penguji Ibu Ria Setyawati, Prof.Dr.Lucianus Budi Kagramanto,S.H.,M.H, Ibu Erni Agustin, S.H., LLM, Ibu Rizky Amalia,S.H.,M.H. selaku tim penguji yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan serta saran dalam rangka penyempurnaan tesis ini.
6. Kepada Dosen Wali saya Taufiq Rahman yang selalu meluangkan waktu dan memberikan masukan serta saran dalam rangka penyempurnaan tesis ini
7. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Pengajar pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas segala ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh perkuliahan.
8. Kepada Bapak dan Ibu Staff Administrasi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, terutama untuk Ibu Emy yang selama ini banyak membantu dalam urusan administrasi sehingga penulisan tesis ini dapat berjalan dengan lancar.
9. Kepada Sahabat dan temanPenulis Ratna Maya, Nia Yustisia, Sarah Mirna, Fuad Ikra, Deviani Henindar, Chanifatin Nidia, dan Chindy Tyara, serta Zana Chobita yang selama ini menemani, memberikan saran, bantuan, dan atas segala bantuan hingga penulisan dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Kepada teman-teman keluarga besar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala bantuan yang diberikan selama penulis menjalani perkuliahan.
11. Kepada Ibu Pimpinan kantor saya Ibu Maria Baroroh, S.H serta jajaran staff teman kantor yang selama ini memberikan support dan waktunya dalam menyelesaikan Tesis ini.
12. Kepada pihak-pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan baik.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa bentuk maupun isi masih jauh dari kesempurnaan. Akhir kata penulis mengharapkan tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan referensi dan bagi mereka yang membutuhkannya sebagai bahan bacaan untuk menambah ilmu pengetahuan.

Surabaya, 13 Juli 2022
Penulis,



IDHA RACY ROSALIA HADI, S.H.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi seringkali terjadi adanya hal persaingan usaha tidak sehat pada sektor Jasa Konstruksi. Persoalan yang sering muncul yaitu permasalahan hukum dalam pelaksanaan suatu pekerjaan konstruksi, maka untuk mengatasi persoalan tersebut Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengakomodir dalam hal penyelenggaraan jasa konstruksi dengan adanya pembinaan jasa konstruksi pada Sumber daya manusia yang harus merekrut tenaga kerja konstruksi yang memenuhi standar kompetensi kerja.

Untuk mengatasi persoalan tersebut memenuhi standar kompetensi kerja dengan persyaratan yang ditetapkan badan usaha dengan wajib memiliki sertifikasi ketrampilan kerja bagi penyedia jasa. Proses sertifikasi dapat dilakukan melalui lembaga sertifikasi yaitu Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Dalam hal pengawasan terhadap LPJK maka Menteri membentuk Dewan Pengawas LPJK. agar LPJK dalam melakukan tugas, fungsi dan kewenangannya sesuai dengan amanat perundang-undangan.

**Kata Kunci : Jasa Konstruksi, Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan
Jasa Konstruksi, Persaingan Usaha Tidak Sehat**

ABSTRACT

This research is motivated by the frequent occurrence of unfair business competition in the Construction Services sector. The problem that often arises is legal problems in the implementation of a construction work, so to overcome this problem, Government Regulation Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 accommodates the provision of construction services by providing construction services to human resources who must recruiting construction workers who meet work competency standards.

To overcome this problem, meet the work competency standards with the requirements set by the business entity by being required to have work skills certification for service providers. The certification process can be carried out through a certification body, namely the Construction Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). In terms of supervision of LPJK, the Minister shall establish the Supervisory Board of LPJK. so that LPJK in carrying out their duties, functions and authorities in accordance with the mandate of the legislation.

**Keyword : Construction service, Supervisory Bord Of Lembaga Pengembangan
Jasa Konstruksi, Unfair Competition**

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. *Burgerlijk Wetboek Staatsblaad* nomor 23 tahun 1847.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
7. Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
8. Peraturan Komsisi Pengawas Persaingan Usaha Replublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 410/KPTS/M/2021 Tentang Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-2024.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	7
3. Tujuan Penelitian	7
4. Manfaat Penelitian	7
4.1. Manfaat Teoritis	8
4.2. Manfaat Praktis.....	8
5. Metode Penelitian	8
5.1. Tipe Penelitian.....	8
5.2. Pendekatan Masalah	8
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	9
1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
1.6.5. Analisa Bahan Hukum.....	10
1.7. Sistematika Penulisan	11

BABI II KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA

PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI UNTUK MEMASTIKAN ADANYA PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT

2.1 Kedudukan Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa

Konstruksi Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2017

Tentang Jasa Konstruksi..... 13

2.2 Konsep Persaingan Usaha pada Jasa Konstruksi Ditinjau

Dari Undang-undang 5 Tahun 1999 19

2.3 Persekongkolan Tender Pada Jasa Konstruksi 26

BAB III PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

DALAM SEKTOR JASA KONSTRUKSI

3.1 Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Sektor

Jasa Konstruksi 32

3.2 Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dalam Pemilihan

Penyedia Jasa Konstruksi..... 40

3.3 Akibat Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam

Pemilihan Penyedia Jasa 46

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan 52

4.2 Saran 53

DAFTAR BACAAN